

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Persoalan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah, selalu muncul dalam berbagai permasalahan yang menuntut kebijakan yang tepat dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyelesaikan permasalahan seyogyanya merupakan kebijakan yang telah didasari atas pertimbangan yang rasional, matang dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut menjadikan kita untuk mengedepankan aspek penelitian dan pengembangan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis tersebut, hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan pembangunan daerah.

Hal di atas sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa : *“Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan IPTEK di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK”*. Dalam kapasitas ini, Pasal 21 Ayat (40), kembali ditegaskan bahwa : *“Pemerintah Daerah perlu membentuk Lembaga Litbang sebagai unit kerja Pemerintah Daerah”*.

Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Provinsi Jambi tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional karena Provinsi Jambi merupakan bagian integral dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan IPTEK di Provinsi Jambi harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan juga tidak terlepas dari arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi.

Visi pembangunan IPTEK nasional sampai tahun 2025 adalah *“IPTEK sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”*. Visi tersebut dijabarkan dalam 6 misi, yaitu : 1) Menempatkan IPTEK sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; 2) Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan IPTEK; 3) Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era global; 4) Meningkatkan difusi IPTEK melalui pemanfaatan jaringan pelaku dan kelembagaan IPTEK termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi IPTEK; 5) Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan IPTEK yang berkualitas dan kompetitif, dan 6) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Lembaga litbang pemerintah daerah adalah institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melakukan aktivitas riset. Salah satu institusi litbang yang lahir mengiringi diberlakukannya era otonomi daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi dengan Kategori Tipe A yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah penyelenggaraan pemerintah bidang penelitian dan pengembangan daerah yang berbasis inovasi daerah serta penerapan IPTEK dalam pembangunan Provinsi Jambi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi perlu menyusun rencana strategi, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di dalamnya. Renstra sebagai suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Berkaitan Renstra ad

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan dan merumuskan arah kebijakan serta indikasi program/kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan dan IPTEK serta Inovasi dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021, dan sebagai salah satu acuan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menyusun program kegiatan mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan IPTEKIN Provinsi Jambi Tahun 2017-2021 selain mengacu pada Nawacita dan RPJMD Provinsi Jambi.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 12. Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 16. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Dewan Riset Nasional;
 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
25. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 111/M.Kp/VIII/2005 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK 2005-2009;
26. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 89/M.Kp/V/2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Riset Nasional 2005-2008;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
31. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi Provinsi Jambi Tahun 2017-2021;
32. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
33. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 327 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Daerah Plasma Nutfah (KDPN) Provinsi Jambi;
34. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra-HKI) Provinsi Jambi;
35. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 341/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bkati 2016-2021;
36. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 489/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 341/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bhakti 2016-2021; dan
37. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 126/KEP.GUB/BALITBANGDA-1.3/2019 tanggal 07 Februari 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1165/KEP.GUB/BALITBANGDA-1/2016 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi Masa Bkati 2017-2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pentingnya Renstra bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan dan pembangunan daerah, yang akan dijadikan acuan dalam penilaian kegiatan yang strategis bagi pimpinan organisasi dalam kurun waktu 5 tahun.

Maksud

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan mengantisipasi perubahan kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan maupun *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka percepatan program pembangunan, dan sebagai pedoman Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi serta untuk mempermudah dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sehingga menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Sedangkan untuk mengakomodir kebutuhan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan isu-isu aktual dan mendesak yang diperlukan oleh pemerintah daerah akan dilakukan penelitian yang bersifat mandiri maupun penelitian analisis kebijakan secara antisipatif dan responsif.

Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan kegiatan SKPD selama 5 tahun, yaitu :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada Aparatur Internal Balitbangda Provinsi Jambi, kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi dengan rencana pembangunan daerah dan nasional.
2. Membangun sistem kerja Balitbangda Provinsi Jambi yang akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Balitbangda Provinsi Jambi guna meningkatkan komitmen kerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Memberikan kerangka dasar dalam perumusan kebijakan, guna percepatan pencapaian program pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis dan utuh tentang keseluruhan isinya, Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

Bab ini memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya Balitbangda/susunan kepegawaian dan perlengkapan, Kinerja pelayanan Balitbangda serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**
Bab ini memuat penjelasan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra, telaah Renstra Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Jambi.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini memuat penjelasan tentang rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini memuat penjelasan tentang Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP**
Bab ini Penutup, sebagai bagian akhir dari Dokumen Rencana Strategis Balitbangda 2016-2021.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Litbang dalam konteks kebijakan daerah dapat digambarkan ke dalam 4 faktor kunci fungsi kelitbang daerah, yaitu :

- 1) Mengenal masalah dan mengidentifikasi isu-isu;
- 2) pemahaman isu-isu kunci;
- 3) mendukung rencana aksi yang terpilih; dan
- 4) mengevaluasi kemajuan suatu program.

Berdasarkan 4 faktor kunci tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk memberikan bukti-bukti dan informasi kepada kebijakan kepala daerah (*decision maker*) dan mendukung pengembangan pelayanan publik serta menemukan dan menguji ide-ide baru dalam rangka memperbaiki inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara kelembagaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) sebagai Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Pimpinan Daerah dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Keberadaan Badan Litbang memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan program Pemerintahan Daerah, yakni :

Peran diawal, memberikan input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis daerah kedepan, yaitu : mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat; mempersiapkan data untuk perencanaan pembangunan daerah; penyusunan skala prioritas pembangunan atau kebijakan strategis; dan asumsi-asumsi terhadap dampak pembangunan/kebijakan strategis serta evaluasi kebijakan sebelumnya untuk disempurnakan.

Peran ditengah, memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program daerah yang tengah berjalan. Hal ini berguna, baik sebagai kontrol maupun katalisator dalam pencapaian sasaran program.

Peran diakhir, memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Tabel 2.1.
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Peran Awal	Peran Tengah	Peran Akhir
<p>Penjabaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan input dalam proses penyusunan langkah-langkah atau kebijakan strategis daerah ke depan. 2. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat 3. Mempersiapkan data untuk perencanaan pembangunan daerah, penyusunan skala prioritas pembangunan atau kebijakan strategis, dan asumsi-asumsi terhadap dampak pembangunan/kebijakan strategis serta evaluasi kebijakan sebelumnya untuk disempurnakan. 	<p>Penjabaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan berbagai input/rekomendasi dalam rangka implementasi program-program daerah yang tengah berjalan. 2. Sebagai kontrol maupun katalisator dalam pencapaian sasaran program. 	<p>Penjabaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan input dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program sebagai bentuk evaluasi, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugas dimaksud Balitbangda mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbang di Pemerintahan Provinsi;
2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. pelaksanaan kegiatan kelitbang di pemerintahan provinsi;
4. pembinaan dan fasillitasi kelitbang kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbang kab/kota;
5. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbang di provinsi;
7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbang lingkup pemerintah provinsi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda;
9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
10. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di Daerah;
11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi; dan
12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga yang berkompeten terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait permasalahan sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi berbagai regulasi dan kebijakan.
2. Bersama OPD lainnya merumuskan agenda Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan kebijakan daerah melalui naskah akademik.
3. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik.
4. Melakukan kegiatan litbang sesuai prioritas daerah dan kebutuhan litbang OPD serta lembaga litbang lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
5. Melakukan kajian dan inovasi terhadap implementasi regulasi/kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan holistik terhadap Pemerintah Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Sekretariat

Tugas : membantu badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat

Fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Sekretaris.

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan

Tugas : Membantu Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan;
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
- Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tugas : Membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program, dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi;
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Kerjasama

Tugas : Membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama.

Fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang Iptek dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;
- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
- Sub Bidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
- Sub Bidang Diseminasi dan Publikasi.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Inovasi Daerah

Tugas : Membantu Badan dalam rangka melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan

kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah.kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti sesuai Keputusan Ketua LIPI Nomor 1660/D/1999 tanggal 13 Juli 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Panitia Penilai Jabatan Peneliti dan Keputusan Kepala LIPI No. 1661/D/1999,tanggal 13 Juli 1999 tentang Pedoman Penilaian Karya Ilmiah Jabatan Peneliti.

Pengertian :

- Jabatan Peneliti : Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pejabat peneliti dalam suatu organisasi penelitian dan pengembangan
- Pejabat peneliti : Pegawai Negeri Sipil yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan
- Penelitian : Suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

Tugas Utama Peneliti

1. Tugas Pokok Asisten Peneliti Muda dan Asisten Peneliti Madya :
 - Membantu merencanakan kegiatan penelitian
 - Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitiannya
2. Tugas pokok Ajun Peneliti Muda dan Ajun Peneliti Madya :
 - Merumuskan dan merencanakan kegiatan penelitian dengan bimbingan
 - Melakukan kegiatan penelitian dengan pengawasan
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian

4. Tugas Pokok Ahli Peneliti Muda, Ahli Peneliti Madya dan Ahli Peneliti Utama:
 - Merumuskan dan membuat rencana kegiatan penelitian
 - Melakukan kegiatan penelitian
 - Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
 - Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pejabat peneliti di bawahnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian
 - Merumuskan arah untuk kebijaksanaan pengembangan IPTEK
 - Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional

Tanggung Jawab dan Hak Peneliti

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pejabat peneliti mempunyai kebebasan mimbar ilmiah secara bertanggung jawab dan dapat memperoleh serta menggunakan data dan informasi, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, menggunakan fasilitas dan sarana, sepanjang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pustakawan

Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Pustakawan terdiri dari :

1. Pustakawan Tingkat Terampil adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma II bidang lain yang disetarakan.
2. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang dasar pendidikan untuk pengangkatannya pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain yang disetarakan.

Tugas Pokok Pejabat Fungsional Pustakawan

Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil :

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/bahan informasi.
2. Pemasarakatn perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Ahli :

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/bahan informasi
2. Pemasarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi
3. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Dalam rangka pengembangan profesi, pejabat fungsional Pustakawan selain melaksanakan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya dapat juga melaksanakan tugas-tugas pengembangan profesi yang meliputi:

1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (PUSDOKINFO)
2. Menyusun pedoman/petunjuk teknis PUSDOKINFO
3. Menerjemahkan/menyadur buku-buku dan bahan lain di bidang PUSDOKINFO
4. Melakukan tugas sebagai Ketua kelompok /Koordinator Pustakawan atau memimpin unit Perpustakaan.

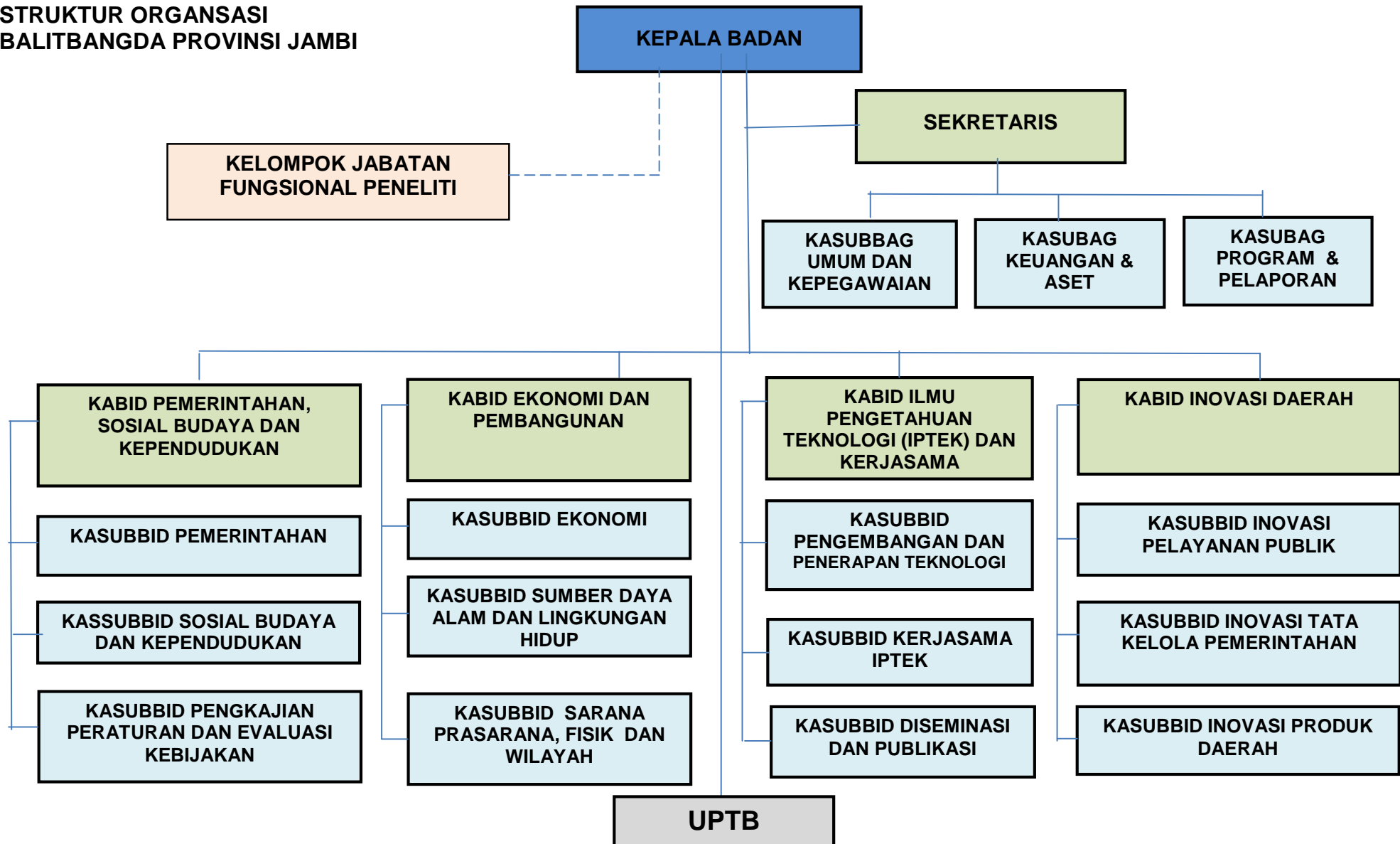
5. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan.
6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.

Untuk optimalisasi kinerja kelembagaan Balitbangda Provinsi Jambi didukung oleh upaya peningkatan kapasitas penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan, ketatalaksanaan dan peningkatan kompetensi peneliti serta sumber daya manusia. Disamping itu sumber daya manusia pada Balitbangda Provinsi Jambi juga didukung oleh organisasi lain yang secara fungsional merupakan mitra Balitbangda Provinsi Jambi antara lain : Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Evaluasi Kebijakan dan Program, Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD), Operasional Jaringan Penelitian Daerah (Jarlitda), Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Balitbangda Provinsi Jambi, Operasional Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sentra Promptek), Komisi Daerah Plasma Nutfah (KDPN) Provinsi Jambi dan Penyebarluasan Hasil Litbang melalui Jurnal Khazanah Intelektual dan Gema Litbang, Perumusan Naskah Akademik, Pengkajian Perda serta Pergub.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balitbangda Provinsi Jambi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Kepala Badan), 4 pejabat eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 pejabat eselon I (3 Kasubbag dan 12 Kasubbid) dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut :

**STRUKTUR ORGANSASI
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**



2.2. SUMBER DAYA

Sumberdaya aparatur dan aset yang dikelola merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Susunan Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) yang ada pada Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan jabatan dan pendidikan terakhir serta aset yang dikelola Ballitbangda Provinsi Jambi disajikan pada di bawah ini.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan (orang)

Jabatan	Jumlah Pegawai					Total
	s/d SLTA	D3	S1	S2	S3	
Eselon II	-	-	-	1	-	1
Eselon III	-	-	1	2	2	5
Eselon IV	-	-	12	2		14
Peneliti	-	-	-	7	2	9
Kandidat Peneliti	-	-	-	-	-	-
Staf	11	-	18	8	1	38
Total	11	-	31	22	5	67

Tabel 2.3.
Perlengkapan dan Aset yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016

No.	Nama Barang	Volume	Perkiraan Nilai (Rp)
1	Gedung Kantor	1 Unit	
2	Kendaraan roda 4	9 unit	1.665.362.500
3	Kendaraan roda 2	17 unit	241.184.830
4	Air Conditioner (AC)	14 unit	96.861.000
5	Filling Kabinet	14 buah	178.419.204
6	Handycam	2 buah	14.200.000
7	Infocus	3 buah	10.150.000
8	Komputer	27 unit	233.453.560
9	Laptop	13 buah	173.550.000
10	Lemari kayu dan kaca	15 buah	39.497.310
11	Meja kerja	40 buah	86.190.290
12	Printer	19 buah	55.040.500

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode renstra sebelumnya (2011-2011). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Balitbang pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Kegiatan yang telah dilakukan Balitbangda Provinsi Jambi pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.4. di bawah ini :

Tabel 2.4.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Balitbangda Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait	--	-			25	50	65	70		25	50	65	70		100	100	100	100
2	Prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah	--	-	--		25	50	65	70		25	50	65	70		100	100	100	100
3	Prosentase terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan litbang dan diseminasi hasil-hasil litbang	-				25	40	65	100		25	40	65	100		100	100	100	100
4	Prosentase diterapkannya teknologi yang direkomendasikan dalam peningkatan nilai tambah usaha masyarakat	-				20	25	35	45		20	25	35	45		100	100	100	100

1. Capaian indikator Kinerja Prosentase terlaksananya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait

Tahun 2012 prosentase terlaksananya peningkatan hasil penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait dengan target 25 % tercapai 100%. Tahun 2013 mencapai 50% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Target pada tahun 2013 sebesar 65% dengan capaian sebesar 100%. Sementara tahun 2014 realisasi mencapai 100%.

2. Capaian indikator Kinerja Prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah

Tahun 2012 prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah dengan target 25 % tercapai 100%. Tahun 2013 mencapai 50% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Target pada tahun 2014 sebesar 65% dengan capaian sebesar 100%. Sementara tahun 2015 realisasi mencapai 100%.

3. Capaian indikator Kinerja Prosentase terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan litbang dan diseminasi hasil-hasil litbang

Tahun 2012 prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah dengan target 25 % tercapai 100%. Tahun 2013 mencapai 40% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Target pada tahun 2013 sebesar 65% dengan capaian sebesar 100%. Sementara tahun 2014 realisasi mencapai 100%.

4. Capaian indikator Kinerja Prosentase terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan litbang dan diseminasi hasil-hasil litbang

Tahun 2012 prosentase terlaksananya peningkatan hasil produksi dalam mendukung daya saing daerah dengan target 20 % tercapai 100%. Tahun 2013 mencapai 25% atau 100% tercapai dari target yang telah ditentukan. Target pada tahun 2013 sebesar 35% dengan capaian sebesar 100%. Sementara tahun 2014 realisasi mencapai 100%.

2.3.2. Capaian Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran dan Realisasi trendnya berfluktuatif seperti yang tergambar pada table 2.5 di bawah ini. Dilihat dari anggaran mengalami kenaikan tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Tahun 2013 anggaran mengalami penurunan anggaran, hal ini disebabkan rata-rata Jika dicermati pada tabel ini, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Laporan Keuangan memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu 100% setiap tahunnya dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur memiliki rasio realisasi tertinggi kedua mencapai 100% dengan rata-rata sebesar 96,90%. Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerja Sama. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.760.900	649.252.170	536.028.750	736.068.320	682.513.920	767.211.746	588.130.603	468.649.936	723.113.518	651.152.880	97,64	90,59	87,43	98,24	95,41	0,14	-0,25
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.029.721.000	994.912.000	703.210.000	723.441.080	826.838.080	1.000.488.067	865.359.102	656.165.251	654.063.080	798.225.580	97,16	86,98	93,31	90,41	96,54	-3,19	0,09
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.105.000	26.850.000	30.000.000	27.200.000	26.400.000	21.105.000	26.850.000	27.999.000	24.800.960	26.400.000	100,00	100,00	93,33	91,18	100,00	5,31	0,14
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.500.000	177.725.000	125.000.000	100.000.000	80.000.000	79.250.000	131.850.000	110.825.000	81.650.000	63.825.000	99,69	74,19	88,66	81,65	79,78	0,45	-3,25
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN LAPORAN KEUANGAN	0	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-10,00	-20,00
VI. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.229.423.700	1.632.957.300	1.737.517.600	1.546.745.700	1.321.736.500	2.169.775.710	1.595.771.810	1.674.793.215	1.479.926.286	1.304.748.736	97,32	97,72	96,39	95,68	98,71	-8,99	0,30
VII. PROGRAM KELEMBAGAAN/KOORDINASI DAN KERJASAMA	241.436.400	1.166.250.100	879.766.650	1.543.017.300	0	225.816.400	1.118.068.600	844.488.007	1.445.498.607	0	93,53	95,87	95,99	93,68	0,00	68,36	-19,96
VIII. PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	63.053.000	83.714.000	74.950.000	250.780.500	0	54.200.000	82.364.000	73.900.700	236.937.416	0	85,96	98,39	98,60	94,48	0,00	32,46	-17,90
IX. PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	158.527.000	289.217.192	211.805.000	0	0	151.837.161	284.531.873	211.805.000	0,00	0,00	95,78	98,38	100,00	12,37	0,87
X. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	998.164.500	0	0	0	0	966.575.580	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00
TOTAL	4.450.000.000	4.736.660.570	4.250.000.000	5.223.970.092	4.147.458.000	4.317.846.923	4.413.394.115	4.013.658.270	4.938.021.740	4.022.732.776							

2.3.3. Hambatan dan Permasalahan yang perlu diantisipasi

Hambatan pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur :

1. Masih terdapat ego sektoral pada OPD yang kurang mendukung kebijakan penelitian yang dilakukan Balitbangda, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program;
2. Penelitian belum dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah, karena masih cenderung memakai kebijakan OPD yang tidak berdasarkan rekomendasi hasil penelitian Balitbangda;
3. Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD lain, sehingga terjadi tumpang tindih kegiatan penelitian, hal ini karena belum dilakukan penelitian satu pintu.
4. Ketersediaan anggaran penelitian belum memadai, sehingga apabila ada kajian/penelitian terhadap isu aktual yang prioritas tidak dapat dilaksanakan; dan
5. Masih belum terbangunnya pola pikir analisis, metodologi dan empiris sebagian besar PNS Balitbangda khususnya Pejabat Fungsional dan fungsional umum

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

2.4.1. Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Balitbangda, yaitu :

1. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
2. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pilar dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Banyaknya penelitian yang tidak bekerjasama dengan Litbang dan Lemlit.
4. Masih terdapat ego sektoral pada OPD yang kurang mendukung kebijakan penelitian yang dilakukan Balitbangda.
5. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
7. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras, tidak terintegrasi dan tidak konsistensi.
8. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah. Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi. Rendahnya budaya Inovasi dikalangan masyarakat dan akademisi menjadi satu tantangan.

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan Balitbangda, yaitu :

1. Dukungan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui APBD.
2. Tersedianya Lembaga-lembaga Litbang (PTN/PTS, Balai-balai Penelitian, Lembaga-lembaga peneliti/Jasa Konsultan lainnya) yang bisa menjadi mitra kerja kegiatan penelitian dan pengembangan.

3. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai permasalahan baik itu dibidang Pemerintahan, Politik, Kemasayarakatan, Kesehatan, Ekonomi dan Keuangan dll. Disatu sisi ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, tapi disisi lain ini menjadi peluang bagi Balitbangda untuk berkontribusi dan menjalankan fungsinya sebagai penelitian dan pengembangan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pengambil Kebijakan terhadap permasalahan yang ada.
4. Berdasarkan posisi strategis, pada prinsipnya Balitbangda Provinsi Jambi berperan pada bidang formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian kegiatan Kelitbangan Daerah merupakan indikator kemajuan pengembangan dan pembangunan daerah. Optimalisasi program/kegiatan kebijakan pembangunan sangat ditentukan oleh intensitas koordinasi dan sinkronisasi antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerjasama ini menempatkan Balitbangda Provinsi Jambi sebagai koordinator, mediator dan fasilitator dalam kegiatan penelitian dan pengembangan serta memberikan rekomendasi arah kebijakan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi.
5. Dalam rangka peningkatan daya saing masyarakat dalam menghadapi pasar bebas (MEA), kedepan Balitbangda Provinsi Jambi dapat memposisikan perannya sebagai penghubung, penyedia serta pengguna teknologi, inovasi dan katalisator kreatifitas masyarakat dengan adanya kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Kabupaten/Kota, antar provisini maupun pusat, Perguruan Tinggi setempat dan sejumlah lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat pusat.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi, maka peran Balitbangda Provinsi Jambi sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi. Beberapa permasalahan terkait dengan peran Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD maupun masyarakat;

Keberadaan Balitbangda, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah.

2. Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi kelitbangan antar OPD, daerah, swasta dan masyarakat;

Hubungan kerja antara Balitbangda Provinsi Jambi dengan OPD lain ditunjukkan pada proses awal lahirnya kegiatan kelitbangan dan pada tahap pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang harus berkoordinasi dengan dinas teknis yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan sektoral. Selain dengan lembaga litbang kementerian dan perguruan tinggi negeri maupun swasta, penguatan kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek juga dilakukan dengan institusi/lembaga litbang di Kabupaten/Kota. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat : 1) hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah, 2) belum terkoordinasinya dengan baik pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan Kabupaten/Kota, dan 3) masih rendahnya implementasi inovasi Iptek bagi pembangunan di daerah.

3. Keterbatasan kompetensi staf, pejabat dan peneliti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi;

Rendahnya kompetensi SDM, khususnya Peneliti. Disamping itu jumlah SDM Peneliti belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan. SDM Peneliti yang terbatas akan berdampak pada akselerasi penanganan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Provinsi Jambi. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peningkatan kompetensi peneliti diharapkan dapat ditingkatkan melalui diklat teknis, seminar dan workshop. Selain itu peneliti dapat berkolaborasi dalam kegiatan penelitian bermitra dengan Perguruan Tinggi, Lemlit dan OPD terkait.

4. Pendanaan untuk penelitian belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi; Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh porsi anggaran yang sangat terbatas/kecil. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Balitbangda Provinsi Jambi menjadikannya sulit berkembang.
5. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbang. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
6. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

- Tertib :** Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan armonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.
- Unggul :** Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang erdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman :** Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh :** Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan
- Adil :** Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat
- Sejahtera :** Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Dari Visi dan Misi Jambi TUNTAS 2021 yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi menitikberatkan pada Misi ke-1 dan ke-4, dengan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pada tiap-tiap misi yang diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman kegiatan sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.1.

Visi dan Misi Gubernur Jambi serta Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERTIB	1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik
UNGGUL	2. Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan bersetaraan gender		

NYAMAN	3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesetaraan hukum		
TANGGUH	4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi/ Naskah Akademik/Model hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>. 2. Meningkatnya inovasi daerah dalam mendukung daya saing daerah. 3. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. 4. Meningkatnya publikasi hasil penelitian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>. 2. Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah 3. Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah 4. Meningkatnya akses informasi hasil kelitbangan.
ADIL	5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.		
SEJAHTERA	6. Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.		

3.3. TELAAH RENSTRA K/L

3.3.1. Rencana Pembangunan Nasional

Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur. Visi itu dijalanka melalui delapan misi pembangunan. Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 tersebut sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Strategi untuk memantapkan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM. Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode sebelumnya. RPJM Nasional ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.

Sesuai rumusan RPJM Tahun 2015-2019, telah ditetapkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Nasional yang kita sebut dengan **NAWA CITA** yang meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan Reformasi Sistem dan penegakan Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di Pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3.2. Visi Dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Rencana Strategis BPP Kemendagri RI merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (RPJMN 2014-2019), sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun 2005-2025. Tahap kedua ketiga tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2015-2019 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan alat bantu dalam menjalankan kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 2015-2019. Penyusunan Rencana strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas “Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri” Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan Penyusunan Kebijakan Teknis, Program, dan Anggaran Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri.
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri

3. Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
5. Pelaksanaan Fasilitasi Inovasi Daerah
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemerintah Dalam Negeri
7. Pelaksanaan Administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Menteri.

Untuk itu, Visi masa depan Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri RI akan difokuskan pada satu sasaran primer yaitu : kualitas hasil penelitian. Atas dasar pertimbangan tersebut, dan dalam rangka menunjang Visi Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yakni **“Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintah Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Proses Awal dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Mendorong Inovasi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penelitian dan Daya Saing Daerah
3. Memantapkan Jejaring Penelitian antar Instansi Penelitian dan Pengembangan.
4. Memantapkan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.3. Visi Dan Misi Kementerian Ristek Dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI

Dengan pertimbangan menjalankan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemenristekdikti dan mencermati potret permasalahan-permasalahan yang ada, Kemenristekdikti menetapkan Visi **“ Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang Bermutu serta Kemampuan Iptek dan Inovasi Untuk Mendukung Daya Saing Bangsa”**

Sebagai penjabaran lebih lanjut Visi dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kemenristekdikti seperti yang dikemukakan di atas terutama untuk point 2 (dua), maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*), maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah *“Meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa”*.

Dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, pembangunan Iptek diarahkan untuk : (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (2) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspiptek menuju STP yang maju dan modern serta pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; (3) Pembangunan repository dan diseminasi informasi Iptek; serta (4) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.

Disamping itu, invensi pada umumnya lahir di lembaga litbang dan Perguruan Tinggi, di samping di unit-unit litbang industri dan masyarakat. Produk invensi yang masih berupa prototipe, masih harus melewati serangkaian tahapan hingga bisa diterapkan dalam proses produksi atau diproduksi massal oleh industri. Untuk itulah, diperlukan sebuah lembaga yang mampu memfasilitasi aliran invensi menjadi inovasi lebih efisien dan efektif.

Di banyak negara maju, lembaga atau wahana tersebut sering disebut dengan *Science and Technology Park* (STP). Namun dengan semakin berjalannya waktu serta disesuaikan dengan fungsi dan manfaatnya yang spesifik di setiap wilayah di Indonesia maka dalam penamaannya ke dalam bahasa Indonesia, lembaga atau wahana ini diusulkan menjadi Taman Sains dan Teknologi (TST). Keberadaan TST ini terbukti berhasil mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi. Dalam rangka pengembangan Taman Sains dan Teknologi, arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) yang diarahkan berfungsi sebagai :
 - 1) Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
 - 2) Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju; dan
 - 3) Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.
- b. Pembangunan Taman Sains Provinsi diarahkan berfungsi sebagai :
 - 1) Penyedia pengetahuan terkini oleh dosen Perguruan Tinggi setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
 - 2) Penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; dan
 - 3) Sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Institusi penelitian, baik di tingkat pusat maupun daerah bertanggung jawab untuk menghasilkan dokumen penelitian pembangunan berdasarkan proses penelitian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penelitian Pembangunan Nasional. Penelitian dimaksud dimulai dari daerah hingga tingkat nasional yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan penelitian antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara penelitian, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasar hal tersebut, maka penentuan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran institusi penelitian pembangunan harus selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Balitbangda Provinsi Jambi, sebagai institusi penelitian di daerah, menyusun program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang selaras dengan program dan kegiatan Balitbang Depdagri, sebagai institusi penelitian di tingkat pusat.

Tabel 3.2.
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota Terhadap
Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran Renstra Renstras K/L (Kemenristek dikti RI)	Sasaran Pada Renstra K/L (BPP Kemendagri RI)
1	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .		Meningkatkannya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri
2	1. Persentase Peningkatan SIDA 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan Stakeholders	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	Meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi serta penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
3	Science Park yang dikembangkan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek menuju STP yang maju dan modern serta pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek;	
4	Persentase hasil publikasi kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	Meningkatnya akses informasi hasil kelitbangan		

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Namun dalam upaya mengoptimalkan peran dan pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi berbagai permasalahan timbul. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Balitbangda yang mempengaruhi pelayanan OPD, yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) sebagai payung hukum pelaksanaan Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga resmi pemerintah daerah yang mempunyai tupoksi pelaksana litbang dan inovasi.
- Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja
- Tersedianya Tenaga Peneliti

- Komitmen Pemerintah Daerah sudah mulai tumbuh
- b. Kelemahan
 - Jumlah dan Kompetensi SDM Balitbangda yang masih terbatas. Masalah ini sangat crucial, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan litbang dan inovasi, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai Tupoksi litbang, ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun, tetapi tidak ada formasi untuk pengangkatan CPNS baru.
 - Sarana dan prasarana yang belum mendukung Tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai lembaga riset.
 - Motivasi dan minat skill peneliti (SDM)
 - Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan tupoksi
 - Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada hasil-hasil penelitian dengan kata lain penelitian belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah
- 2. Faktor Eksternal
 - a. Peluang
 - Banyaknya permasalahan yang perlu diteliti/dikaji untuk masukan kebijakan daerah maupun permasalahan di masyarakat
 - Kerjasama dengan lintas sektoral : Perguruan tinggi, LPK dan LPKN
 - Perberlakuan MEA dan perjanjian pasar bebas regional maupun internasional lainnya mendorong lembaga riset berperan lebih aktif melakukan riset dan inovasi produk dan penerapan standarisasi
 - Sumber daya alam yang mendukung
 - Adanya Dewan Riset Daerah
 - b. Ancaman
 - Masih terdapatnya ego sektoral pada masing-masing OPD yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program
 - Hasil penelitian pihak luar yang kontradiktif dengan kebijakan daerah/kebutuhan masyarakat
 - Kegiatan kajian/penelitian masih dilaksanakan oleh OPD di luar Balitbangda Provinsi Jambi sehingga kegiatan penelitian belum dilakukan melalui satu pintu
 - Persepsi yang kontradiktif/negatif oleh sebagian pihak kepada Lembaga Litbang/Riset

Tabel 3.3.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Balitbangda Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Balitbangda
			Internal	Eksternal	
Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersediannya data base pendukung penelitian - Hasil penelitian dan kajian tidak semuanya dapat diimplementasikan oleh 		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang belum mendukung tupoksi balitbangda sebagai lembaga riset - Kompetensi sebagai pejabat, staf dan peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian pihak luar yang kontradiktif dengan kebijakan daerah / kebutuhan masyarakat - Persepsi kontradiktif / 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dalam kegiatan penelitian dan pengembangan - Hasil penelitian /kajian tidak semuanya dapat diimplementasikan Pemda maupun masyarakat - Sistem informasi

	Pemda dan masyarakat		<p>belum mendukung penguatan kinerja Balitbangda sebuah lembaga riset</p> <p>- Masih terbatasnya dana untuk melaksanakan tupoksi</p>	<p>negatif oleh sebagian pihak kepada lembaga Litbang/ Riset</p>	<p>(website) tidak maksimal dalam menghadapi Pasar Bebas (MEA), Pemerintah telah melahirkan UU No.23 Thn 2014 tentang Pemerintah Daerah yang akan mengubah peran Balitbangda bukan hanya mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan Kajian juga ditambah tugas untuk mengevaluasi dokumen perencanaan dan pelaporan.</p>
--	----------------------	--	--	--	---

Permasalahan Balitbangda Provinsi Jambi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Tenaga fungsional peneliti belum seluruhnya memenuhi kompetensi bidang-bidang penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
2. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah; dan
4. Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jambi belum optimal sebagai lembaga pendukung yang diharapkan dapat membantu Balitbangda Provinsi Jambi dalam penyusunan kebijakan teknis dan memberikan rekomendasi kebijakan.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut serta telaahan Visi dan Misi Provinsi Jambi, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Jambi :

1. Perekonomian daerah didominasi oleh produksi barang yang dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah. Dengan demikian sebagian besar nilai tambah hasil produksi tersebut dinikmati oleh daerah atau negara lain. Selain itu harga jual produksi daerah sangat rentan dipengaruhi oleh pasar luar daerah dan luar negeri.
2. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.
3. Masih rendahnya SDM berkemampuan IPTEKIN dan Entrepreneur.
4. Masih rendahnya produktivitas usaha utama masyarakat, terutama usaha pertanian, yang antara lain disebabkan oleh rendahnya penerapan IPTEKIN dalam usaha ekonomi produktif rakyat.
5. Terbatasnya pengembangan budidaya pertanian pangan sehingga kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pada produk dari luar daerah
6. Belum berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat berbasis IPTEKIN dan Entrepreneur yang mampu membantu berbagai aktivitas usaha produktif mereka.

7. Masih ditemuinya kesenjangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.
8. Maraknya barang luar/produksi pertanian dan industri beredar di daerah
9. Kebakaran hutan dan lahan serta alih fungsi lahan
10. Konflik Lahan
11. Rendahnya NTP
12. Belum berkembangnya industri hilir (produk sekunder dan tersier) sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan ekonomi daerah pada produk pertanian, peternakan, perikanan dan hasil hutan dengan memanfaatkan IPTEKIN.
13. Iklim investasi yang belum sehat dengan birokrasi ekonomi biaya tinggi.
14. Belum adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri.
15. Kinerja BUMD masih rendah sehingga Pendapatan Asli Daerah masih rendah.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu/permasalahan menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Biasanya identik dengan nama program.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi/naskah akademik/model hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
3. Meningkatkan inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah.
4. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
5. Meningkatnya publikasi hasil penelitian.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dan ingin dicapai dari penyusunan Renstra. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi/naskah akademik/model hasil penelitian dan pengembangan oleh Stakeholder**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_1S_1 : Meningkatnya Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.
2. Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_2S_2 : Meningkatnya produk unggulan dan inovasidaerah.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_2S_2 : Meningkatnya penerapan teknologi daerah.
4. Untuk mencapai tujuan **Meningkatnya publikasi hasil kelitbangan**, ditetapkan sasaran strategis, yaitu : T_3S_3 : Meningkatnya akses informasi hasil kelitbangan.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Blitbangda Provinsi Jambi 2016-2021. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi/naskah akademik/model hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	30 %	50%	50%	50%	50%	50%
2	Meningkatnya inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah	Meningkatnyaproduk unggulan dan inovasi daerah	1. Persentase peningkatan SIDA 2. Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	80%	80%	80%	80% 75%	100% 75%	100% 75%
3	Meningkatnyallmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park yang dikembangkan</i>	0	0	0	0	1	1
4	Meningkatnya publikasi hasil kelitbangan	Meningkatnya informasi hasil kelitbangan	Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung tugas pokok dan mendukung tupoksi.
2. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
6. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
7. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Litbang.
8. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.
9. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan.
10. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain : gedung, perpustakaan, website dan display inovasi.
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Peneliti.
12. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD.
13. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi.
14. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA.
15. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemprov Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi.
16. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat dalam pengembangan kawasan *Science Park*.
17. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik.
18. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya untuk berkontribusi dalam publikasi hasil kelitbangan.
19. Menunjuk tenaga IT yang profesional dalam pengelolaan publikasi hasil kelitbangan.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan menggunakan strategi yang ditetapkan maka kebijakan pokok yang diambil oleh Balitbangda Provinsi Jambi selama kurun waktu lima tahun kedepan adalah:

1. Pengadaan kebutuhan dasar operasional dinas
2. Pengadaan pakaian Dinas
3. Pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana

4. Pelatihan dan Pendidikan bagi aparatur
5. Perbaikan laporan dan evaluasi kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja
6. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Mendorong pematapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas
8. Fasilitasi penguatan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Menyebarluaskan hasil kelitbangan

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

VISI	: Provinsi Jambi yang Tertib		
MISI I	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
Meningkatnyatata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnyatransparansi dan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Balitbangda dalam mendukung tugas pokok 3. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah 5. Peningkatan kualitas SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan laporan dan evaluasi kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja Balitbangda 2. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3. Pengadaan kebutuhan dasar operasional dinas 4. Pengadaan pakaian dinas 5. Pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana 6. Pelatihan dan pendidikan bagi ASN
VISI	: Provinsi Jambi yang Tangguh		
MISI IV	: Meningkatnya daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukungoleh penerapan pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh Stakeholder	Meningkatnya rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan Stakeholder.	Mendorong Pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif. 2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (<i>problem solving</i>) melalui pemanfaatan hasil Litbang. 3. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi. 4. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan

			<p>dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>5. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain : gedung, perpustakaan, website dan display inovasi, dan</p> <p>6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Peneliti.</p>
Meningkatnya Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	Meningkatnya produk unggulan dan Inovasi Daerah	Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	<p>1. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD</p> <p>2. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi</p> <p>3. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA</p>
Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Meningkatnya penerapan teknologi Daerah	Fasilitasi penguatan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	<p>1. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi</p> <p>2. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat dalam pengembangan kawasan <i>Science Park</i>.</p>
Meningkatnya publikasi hasil kelitbangan	Meningkatnya akses informasi kelitbangan	Menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan	<p>1. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik.</p> <p>2. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya untuk berkontribusi dalam publikasi hasil kelitbangan.</p> <p>3. Menunjuk tenaga IT yang profesional dalam pengelolaan publikasi hasil kelitbangan.</p>

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplemntasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Balirbvangda Provinsi Jambi.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dalam kurun waktu Rahun 2016-2021 antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantaron
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Penelitian dan Pengembangan
7. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan
8. Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian program Balitbangda Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Alat Studio
 - Pengadaan Mebeleur
 - Pengadaan Komputer
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Listrik dan elektronik
 - Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
 - Pembangunan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan OPD
 - Apresiasi Penataan Keuangan dan Pengelolaan Aset
- f. Program Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian Mandiri
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial Budaya dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Pelayanan Publik
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Produk Daerah

 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan Desa

- Penelitian dan Pengembangan Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Data dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid SDA dan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial Budaya
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemberdayaan Masyarakat
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi dan Pengembangan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Penelitian dan Pengembangan Subbid Diseminasi Kelitbang
- g. Program Penguatan Kelembagaan Litbang
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Kinerja Litbang
 - Dewan Riset Daerah Provinsi Jambi (DRD)
 - Rakor dan Forum Kelitbang
 - Sumber Daya Genetik (SDG)
 - Penerbitan Jurnal Litbang
 - Penguatan Jaringan Penelitian (Jarlit) di Provinsi Jambi
 - Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif
 - Peningkatan Kompetensi Peneliti
 - Diseminasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian
 - Seminar Nasional
 - Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal maupun Indikasi Geografis
- h. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
- Science Park di Provinsi Jambi
 - Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
 - Pengembangan Kelembagaan Sentra Promosi dan Pemasaran IPTEK
 - Penerapan dan Pengembangan Citin Chitosan
 - Pengembangan Pusat Teknologi Reklamasi Lahan

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 5.1. di bawah ini.

**Tabel 6.1. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Rp (juta)	Target	
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran	NA	2.638,3	100	2.816,5	100	2935,5	100	3.049	100	3.031,2	100	3.100	100	17.570,5	100	Balitbangda
	Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat keluar		78	8000 lbr	109	8000 lbr	120	8000 lbr	152	8000 lbr	214	8000 lbr	299	8.000 lbr	300	48.000 lbr	Balitbangda
	Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik		170	12 bulan	238	12 bulan	250	12 bulan	333	12 bulan	466	12 bulan	653	12 bulan	700	72 bulan	Balitbangda
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		135	17 orang	189	17 orang	200	17 orang	264	17 orang	370	17 orang	518	17 orang	600	102 orang	Balitbangda
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan		120	4 triwulan	168	4 triwulan	190	4 triwulan	235	4 triwulan	329	4 triwulan	460	4 triwulan	500	24 triwulan	Balitbangda
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		40	51 jenis	56	51 jenis	112	51 jenis	156	51 jenis	219	51 jenis	307	51 jenis	400	306 jenis	Balitbangda
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Buku		40	3 paket	56	3 paket	56	3 paket	60	3 paket	75	3 paket	80	3 paket	85	18 paket	Balitbangda
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan penggandaan dan cetakan		25	10 jenis	35	10 jenis	40	10 jenis	49	10 jenis	68	10 jenis	96	10 jenis	100	60 jenis	Balitbangda
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		12	9 jenis	16	9 jenis	20	9 jenis	23	9 jenis	32	9 jenis	46	9 jenis	50	54 jenis	Balitbangda
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu		50	500 org	70	500 org	80	500 org	98	500 org	137	500 org	192	500 org	300	3000 org	Balitbangda
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		400	35 kali	560	35 kali	650	35 kali	784	35 kali	1.097	35 kali	1.536	35 kali	1.600	210 kali	Balitbangda
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	1.080,6	10	2.638	10	4.549	10	7.703,35	10	8.638	10	9.000	10	33.608,95	60	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional		400	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	560	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	600	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	784	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.097,6	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.536,6	1 unit roda 2 unit roda 2	1.800	6 unit roda 12 unit roda 2	Balitbangda
	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	1 paket	189	1 paket	200	1 paket	264	1 paket	370	1 paket	518	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		58	1 paket	81	1 paket	90	1 paket	113	1 paket	159	1 paket	222	1 paket	300	6 paket	Balitbangda
	Pengadaan mebeleur	Jumlah /jenis pengadaan mebeleur		45	1 paket	63	1 paket	70	1 paket	88	1 paket	123	1 paket	172	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
	Pengadaan Alat Studio	Jumlah /jenis pengadaan Alat Studio		50	1 paket	65	1 paket	75	1 paket	89	1 paket	120	1 paket	170	1 paket	200	6 paket	Balitbangda
	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop dan printer.		120	1 paket	168	1 paket	180	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung /kantor	Jumlah unit kantor		250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	490	1 paket	686	1 paket	960	1 paket	1.000	6 paket	Balitbangda
	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		450	1 ta hun	630	1 ta hun	700	1 tahun	882	1 tahun	1.234	1 tahun	1.728	1 tahun	1.900	6 tahun	Balitbangda
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan listrik dan elektronik	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang terpelihara		32	1 ta hun	44,80	1tahun	50	1 tahun	62,72	1 tahun	87,808	1 tahun	122,931	1 tahun	1.500	6 tahun	Balitbangda
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pedrlengkapan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		250	1 tahun	350	1 ta hun	400	1 tahun	490	1 tahun	686	1 tahun	960	1 tahun	1.200	6 tahun	Balitbangda
	Pemeliharaan Berkala rutin peralatan gedung kantor	Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		100	1 ta hun	140	1 ta hun	160	1 tahun	196	1 tahun	274	1 tahun	384	1 tahun	500	6 tahun	Balitbangda
	Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhab		3.000	1 ta hun	4.200	1 paket	5.000	1 paket	5.880	1 paket	8.232	1 paket	11.524	1 paket	15.000	6 paket	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1.000	1 paket	2.500	1 paket	3.500	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	15.000	1 paket	18.000	6 paket	Balitbangda
	Pengadaan Peralatan Inkubator	Jumlah Mesin Inkubator		175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	Balitbangda
	Pengadaan Mesin Penggiling Karet	Jumlah Penggiling Karet		125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	Balitbangda
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	NA	27	10	28	10	32	10	34	10	42	10	50	10	212,45	60	Balitbangda
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng kapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertetu		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	NA	80	10	120	10	120	10	139	10	179	10	200	10	838	60	Balitbangda
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/ bintek		200	4 org	280	4 org	300	4 org	392	4 org	548	4 org	768	4 org	900	24 org	Balitbangda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip		10		15		20		20		20		25		110		Balitbangda
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Realisasi Kinerja Keuangan OPD	Jumlah laporan keuangan		20	30 buku	28	30 buku	30	30 buku	39	30 buku	45	30 buku	50	30 buku	212	180 buku	Balitbangda
	Apresiasi Penataan Keuangan dan Pengelolaan Aset	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset		35	1 lapporan	89	1 lapporan	100	1 lapporan	115	1 lapporan	120	1 lapporan	121	1 lapporan	580	6 laporan	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil Rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	NA	1.616,86	30	5.000	50	7.000	50	9.800	50	13.720	60	19.205	60	56.211,86	60	Balitbangda
	Penelitian Mandiri	Jumlah Rekomendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Subbid Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	5.000	2 Reko mendasi	Balitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Subbid Sosial Budaya dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi/Nskah Akademik/Model yang dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 rekomendasi /naskah akademik/ Model	3.841	1 rekomendasi /naskah akademik/ Model	5.000	2 rekomendasi/ naskah akademik/ Model	Balitbangda
	Penelitian dan Pengembangan Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Inkubator Bisnis Binaan Balitbangda i	3.841	1 Inkubator Bisnis Binaan Balitbangda i	4.000	4 Rekomendasi / 2 Inkubator Bisnis Binaan Balitbangda i	Balitbangda
	Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
	Litbang Subbid Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
	Litbang Subbid Sarana, Prasarana, Fisik dan Wilayah	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	2 Reko mendasi	Balitbangda
	Litbang Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
	Litbang Subbid Kependudukan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda

		Litbang Subbid Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Pemerintahan Desa	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Inovasi dan Pengemb. Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Lomba Inovasi antar OPD yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Kali Lomba/9 inovasi daerah	3.841	1 Kali Lomba/9 inovasi daerah	5.000	1 Kali Lomba/9 inovasi daerah	Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Sosialisasi/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	2 Kali	3.841	2 Kali	5.000	2 Kali	Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Subbid Inovasi Produk Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan SIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Sosialisasi dan 1 Pelatihan	3.841	1 Sosialisasi dan 1 Pelatihan	5.000	2 Sosialisasi dan Pelatihan	Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengembangan dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Kaji Terap	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Laporan Kaji Terap	3.841	1 Laporan Kaji Terap	5.000	1 Laporan Kaji Terap	Balitbangda
		Penelitian dan Pengembangan Subbid Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	1 Sosialisasi	3.841	1 Sosialisasi	5.000	2 Sosialisasi	Balitbangda
		Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait	1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	-	-	-	-	4.000	4 Reko mendasi	Balitbangda

		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan	100	1.478,98	100	1.895	100	2.653	100	3.714,20	100	5.119,72	100	72.799,60	100	87.740,50	100	Balitbangda
		Rakor dan Forum Kelitbang	Jumlah Rakor yang dilaksanakan		250	2 kali	350	2 kali	400	2 kali	490	2 kali	686	2 kali	960	2 kali	1.100	12 kali	Balitbangda
		Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Kinerja Litbang	Jumlah laporan kinerja hasil litbang		250	12 buku	300	12 buku	330	12 buku	375	13 buku	521	13 buku	729	13 buku	850	75 buku	Balitbangda
		Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah WorkShop		450	4 Kali	630	4 Kali	700	4 Kali	882	4 Kali	1.234	4 Kali	1.728	4 Kali	1.900	24 Kali	Balitbangda
		Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	3 kali terbit	800	18 kali terbit	Balitbangda
		Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah seminar, lokakarya,workshop yang diikuti		300	5 Orang	357	5 orang	400	5 orang	499	5 orang	-	-	-	-	1.100	20 Orang	Balitbangda
		Penguatan Jaringan penelitian di Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama		400	1Kerjasama	560	1Kerjasama	600	1Kerjasama	784	1Kerjasama	1.096	1 Kerja sama	1.600	1 Kerjasama	1.750	6 Kerjasama	Balitbangda
		Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Forum Diskusi Aktual		-	-	-	-	-	-	-	-	2.744	3 Kali	3.841	3 kali	4.000	6 Kali	Balitbangda
		Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	Jumlah HKI yang mempunyai perlindungan Hukum		224	5 Dokumen	490	5 Dokumen	550	5 Dokumen	686	5 Dokumen	960	5 Dokumen	1.344	5 Dokumen	1.900	30 Dokumen	Balitbangda
		Diseminasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Pertemuan		257	4 Pertemuan	359	4 Pertemuan	400	4 Pertemuan	503	4 Pertemuan	705	4 Pertemuan	987	4 pertemuan	1.050	24 pertemuan	Balitbangda
		Sumber Daya Genetik Produk Unggulan	Jumlah Buku Khasanah IG/ Jumlah Buku Profil Petani Pelestari		175	1 kali Buku IG	245	1 kali Buku IG	245	1 kali Buku IG	300	1 kali Buku IG	480	1 buku IG/ 1 buku	660	1 buku IG / 1 buku	800	4 Buku IG / 2 buku	Balitbangda
		Seminar Nasional	Jumlah judul yang diseminarkan		125	10 Judul	140	10 Judul	150	10 Judul	165	10 Judul	185	10 Judul	200	10 Judul	500	60 Judul	Balitbangda
		Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah	Science Park	0	860,22	0	3.396	0	4.754,4	0	6.656,16	0	931,62	1	13.047	1	29.645,40	1	Balitbangda
			Persentase Peningkatan SIDA	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi	768	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi	900	6 Roadmap SIDA di Kab/Kota dan 3 Inovasi	Balitbangda

Kode	Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
											OPD		OPD		OPD		OPD	
	Science Park	Jumlah SP		2.700	1 Pembangunan Fisik	3.780	1 Pembangunan Fisik	4.000	1 Pembangunan Fisik	5.292	1 Pembangunan Fisik	7.408	1 Pembangunan Fisik	10.372	1 Pembangunan Fisik	12.000	1 Pembangunan Fisik	Balitbangda
	Pengembangan Pusat Teknologi Reklamasi Lahan	Jumlah Laporan Reklamasi lahan		198	1 Rekomendasi	350	1 Rekomendasi	360	1 Rekomendasi	388	1 Rekomendasi	543	1 Rekomendasi	760	1 Rekomendasi	900	6 Rekomendasi	Balitbangda
	Pengembangan Sentra Promosi IPTEK	Jumlah inovasi teknologi yang dihasilkan		350	6 TTG 12 KTI	490	6 TTG 12 KTI	550	6 TTG 12 KTI	686	6 TTG 12 KTI	960	6 TTG 12 KTI	1.344	6 TTG 12 KTI	1.500	36 TTG 72 KTI	Balitbangda
	Penerapan & Pengembangan Chitin Chitosan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Chitin-Chitosan		125	1 kali	130	1 kali	135	1 kali	145	1 kali	175	1 kali	200	1 kali	500	5 kali	Balitbangda

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan Badan Penelitiandan Pengembangan Daerah 2016-2021 tahun 2017 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi sebelum Nomenklatur baru berjumlah 6 (enam) indikator, setelah Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambiditetapkan serta dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Jambi sesuai RPJMD Jambi direvisi menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi.

Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Balitbangda yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	NA	30 %	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	1. Persentase Peningkatan SIDA 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan	0	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100% (2 SIDA) 75%
3	Science Park yang dikembangkan	0	0	0	0	1	1	1	1

4	Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	0	60%	70%	70%	75%	100%	100%	100%
---	--	---	-----	-----	-----	-----	------	------	------

BAB 8

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Revisi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.

Keberhasilan Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh *stakeholder* yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Jambi periode 2016 - 2021 yaitu **Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS)**, serta implemementasi dari Program **NAWACITA**. Visi Gubernur Jambi tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mendukung Visi Gubernur Jambi sesuai dengan TUPOKSI dari masing-masing OPD, yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk mendukung tercapainya Visi Gubernur Jambi.

Balitbangda Provinsi Jambi yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan sudah tidak relevannya nomenklatur Balitbangda yang lama. Balitbangda telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen pelaksanaan Program dan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Periode 2016- 2021 dalam mendukung dan mendorong pembangunan di Provinsi Jambi yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, disamping sebagai pedoman Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang kelitbang.

Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi disusun dapat diukur melalui indikator kinerja dari sasaran. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah Indikator Kinerja Balitbangda yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang tertuang pada Renstra sebelum direvisi sebanyak 6 (enam) indikator, mulai tahun 2020 dengan nomenklatur baru jumlah Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi ditetapkan sesuai dengan TUPOKSI serta dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama Gubernur Jambi sesuai RPJMD Jambi menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi.

Demikian Renstra Revisi 2016-2021 ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh insan Balitbangda Provinsi Jambi dengan BAIK.

Jambi,

**KEPALA BALITBANGDA
PROVINSI JAMBI**

Ir. A Z R I N, M.Si

NIP. 19660224 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BALITBANGDA PROVINSI JAMB	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya	16
2.3 Kinerja Pelayanan	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .	22
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L	25
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	33
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
5.1. Strategi	35
5.2. Arah Kebijakan	35
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB 8 PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.	Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	8
TABEL 2.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan dan Pendidikan	16
TABEL 2.3.	Perlengkapan dan Aset yang dikelol.a Balitbangda Jambi Tahun 2016	16
TABEL 2.4.	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Jambi ..	17
TABEL 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi	19
TABEL 3.1.	Visi dan Misi Gubernur Jambi serta Tujuan dan Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi	24
TABEL 3.2.	Komperasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	29
TABEL 3.3.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Provinsi Jambi	30
TABEL 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi	34
TABEL 5.1.	Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi	37
TABEL 6.1.	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Balitbangda Provinsi Jambi	42
TABEL 7.1.	Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang mengacu pada Sasaran RPJMD	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	15
--	----

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.760.900	649.252.170	536.028.750	736.068.320	682.513.920	767.211.746	588.130.603	468.649.936	723.113.518	651.152.880	97,64	90,59	87,43	98,24	95,41	0,14	-0,25
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.029.721.000	994.912.000	703.210.000	723.441.080	826.838.080	1.000.488.067	865.359.102	656.165.251	654.063.080	798.225.580	97,16	86,98	93,31	90,41	96,54	-3,19	0,09
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.105.000	26.850.000	30.000.000	27.200.000	26.400.000	21.105.000	26.850.000	27.999.000	24.800.960	26.400.000	100,00	100,00	93,33	91,18	100,00	5,31	0,14
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.500.000	177.725.000	125.000.000	100.000.000	80.000.000	79.250.000	131.850.000	110.825.000	81.650.000	63.825.000	99,69	74,19	88,66	81,65	79,78	0,45	-3,25
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN LAPORAN KEUANGAN	0	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0	5.000.000	5.000.000	7.500.000	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-10,00	-20,00
VI. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.229.423.700	1.632.957.300	1.737.517.600	1.546.745.700	1.321.736.500	2.169.775.710	1.595.771.810	1.674.793.215	1.479.926.286	1.304.748.736	97,32	97,72	96,39	95,68	98,71	-8,99	0,30
VII. PROGRAM KELEMBAGAAN/KOORDINASI DAN KERJASAMA	241.436.400	1.166.250.100	879.766.650	1.543.017.300	0	225.816.400	1.118.068.600	844.488.007	1.445.498.607	0	93,53	95,87	95,99	93,68	0,00	68,36	-19,96
VIII. PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	63.053.000	83.714.000	74.950.000	250.780.500	0	54.200.000	82.364.000	73.900.700	236.937.416	0	85,96	98,39	98,60	94,48	0,00	32,46	-17,90
IX. PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	158.527.000	289.217.192	211.805.000	0	0	151.837.161	284.531.873	211.805.000	0,00	0,00	95,78	98,38	100,00	12,37	0,87
X. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	0	0	998.164.500	0	0	0	0	966.575.580	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00	0,00
TOTAL	4.450.000.000	4.736.660.570	4.250.000.000	5.223.970.092	4.147.458.000	4.317.846.923	4.413.394.115	4.013.658.270	4.938.021.740	4.022.732.776							

